

# EFEKTIVITAS KOMANDO KEWILAYAHAN TNI AD DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN WILAYAH

## *Effectiveness of Regional Command of Indonesian National Army In Term of Actualization of Regional Resilience*

Syarifuddin Sara<sup>1</sup> dan Kodiran<sup>2</sup>

*Program Studi Ketahanan Nasional  
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada*

### ABSTRACT

The purpose of this research is (1) to find out the society perception especially in District Military Command 0705/ Magelang to Regional Military Command of Indonesian National Army (TNI AD) nowadays, (2) to find out the function of Regional Military Command of Indonesian National Army (TNI AD) as well as its implementation in term of realizing of regional resilience.

This research uses descriptive method with qualitatively analyzed data. The study took place in Zone of District Military Command 0705/ Magelang in which collecting data was carried out through observation, interview and studying relevant literature.

The result of this research shows that 1) society perception to the existence of District Military Command in Magelang Regency is positive enough, it means that it is helpful enough to give the safe sense and condition for society. However, generally, they do not recognize completely about tasks and function that are carried out by District Military Command, especially in term of defense field; 2) a realization of Indonesian National Army (TNI AD) defense is as Regional Defense Troop, hence tasks performed by District Military Command 0705/ Magelang is actualized in the form of defense duty, civic mission, aid duty, regional resilience counseling as well as social communication, 3) existence of District Military Command 0705/ Magelang is effective enough in term of creating a national resilience condition in region of Magelang. Based on its daily function such as civic mission, duties of aid provided, and early prevention for threat in its region is a real actualization of the high participation of District Military Command 0705/ Magelang in creating the safe condition in the region, including aid for increasing prosperity of society as prerequisite of realized regional resilience.

**Keywords :** *Effectiveness – Regional Command – Regional Resilience.*

1. Akademi Militer, Magelang.

2. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

## PENGANTAR

Indonesia adalah bangsa besar yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama. Kemajemukan itu merupakan kekayaan dan kekuatan yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu sangat terasa terutama ketika bangsa Indonesia membutuhkan kebersamaan dan persatuan dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kebhinnekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi faktor yang sangat menentukan dalam perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia di masa lalu, masa kini dan masa transisi menuju masa depan yang lebih baik. Menurut Budiman (2001), ada dua momentum penting yang merupakan perekat dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia. *Pertama*, pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda yang berasal dari berbagai daerah menyadari sepenuhnya akan kekuatan yang dapat dibangun dari persatuan dan kesatuan nasional. Mereka bersepakat untuk bersatu melalui Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Semangat dan gerakan untuk bersatu itu menjadi sumber inspirasi bagi munculnya gerakan yang terkonsolidasi untuk membebaskan diri dari penjajahan. *Kedua*, bangsa Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan adalah ikrar untuk bersatu padu mendirikan Negara Kasatuan Republik Indonesia, meliputi wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang merdeka dan berdaulat untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Disadari atau tidak, seiring dengan berjalannya waktu, pada saat ini, cita-cita luhur serta rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa pada akhirnya harus dihadapkan dengan kenyataan yang sangat mengkhawatirkan disebabkan adanya berbagai persoalan yang sifatnya multi dimensional sebagai efek yang ditimbulkan oleh adanya krisis ekonomi yang melanda sebagian negara Asia termasuk Indonesia. Hal ini tentunya akan membawa implikasi signifikan terhadap kondisi ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Pada waktu krisis ekonomi melanda negara-negara Asia, khususnya Asia Tenggara, yang paling menderita adalah Indonesia. Sistem ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru tidak berhasil sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan semakin merebaknya krisis kepercayaan. Pada gilirannya ketidakpuasan masyarakat semakin memuncak berupa tuntutan reformasi nasional.

Gerakan reformasi pada hakikatnya bertujuan dan menuntut

perbaikan kehidupan nasional, terutama kehidupan politik yang lebih demokratis dalam keterbukaan, mengindahkan HAM, serta bersih dari KKN, kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan makmur, kepastian dan tegaknya hukum yang berdasarkan keadilan. Dari pernyataan dan tuntutan para mahasiswa dan tokoh reformasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa reformasi hendaknya berlangsung secara damai dengan tetap berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Budisantoso, 2001). Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan reformasi ini telah dimanfaatkan oleh oknum/golongan tertentu untuk kepentingannya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Munculnya reformasi sebagai suatu pertanda adanya perubahan politik secara drastis yang dialami bangsa Indonesia seiring dengan mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998, telah mengakibatkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk dalam tubuh ABRI yang kemudian berubah nama menjadi TNI seiring dengan dipisahkannya Polri dari struktur ABRI. Di tengah kondisi negara yang sedang dilanda euphoria reformasi ini, sorotan terhadap TNI terlihat berkembang sangat kritis. Peranan militer Indonesia sebagai pelopor, stabilisator dan dinamisator pembangunan bangsa yang selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru seolah tidak tersentuh, belakangan ini justru menjadi perdebatan ramai dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya datang dari kalangan kampus, tokoh-tokoh LSM, elit politik sipil, para pengamat politik dan militer, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai kalangan lainnya. Perdebatan-perdebatan yang bernada gugatan bahkan cenderung menghujat dan memojokkan TNI datang bertubi-tubi tanpa pernah mau melihat sedikitpun segi positifnya. Menurut Prayudi (2001), sorotan kritis yang ditujukan terhadap TNI merupakan gejala yang wajar, karena posisi TNI sendiri adalah sebuah kekuatan penting selama perjalanan sejarah republik, terutama ketika dimulainya era demokrasi terpimpin dan mencapai puncaknya saat Soeharto dengan regim Orde Baru-nya memegang kekuasaan. Setelah Soeharto jatuh dari kursi kepresidenan dan Pemilu 1999 berhasil diselenggarakan secara relatif demokratis, berbagai kesalahan regim otoriter dianggap tidak terlepas dari kesalahan TNI, terutama terhadap para perwira TNI yang pernah terlibat dalam lingkaran kekuasaan di masa sebelumnya.

Dengan memperhatikan pendapat Prayudi di atas, esensi yang sebenarnya diperdebatkan adalah dwi fungsi ABRI, yang dalam implementasinya ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan.

Meskipun pada era reformasi saat ini TNI sebagai suatu institusi

telah menyadari adanya kekeliruan-kekeliruan di masa lalu dan telah menunjukkan komitmennya untuk menghapus dwi fungsi melalui reformasi internalnya, namun tuntutan ataupun gugatan terhadap TNI belum berhenti sampai di situ. Di antara gugatan yang masih mengemuka dalam era reformasi ini adalah tuntutan pembubaran atau penghapusan komando kewilayahan (baca koter).

Pada intinya, tuntutan-tuntutan seperti ini muncul dari sebagian kalangan masyarakat karena lembaga ini dianggap sebagai institusi yang tidak efektif keberadaannya, di mana fungsi dan peranannya lebih banyak disalahgunakan dengan memposisikan komando kewilayahan (baca koter) sebagai alat penguasa dalam upaya melestarikan kekuasaannya selama pemerintahan Orde Baru. Berbagai kejadian yang dapat dianggap sebagai bentuk adanya penyimpangan yakni berupa intervensi yang berlebihan dari aparat teritorial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang sebenarnya tidak sesuai dengan proporsinya, antara lain adalah kasus Tanjung Priuk Berdarah pada September 1984, kasus Waduk Nipah pada September 1993, kasus penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996, dan berbagai kasus lainnya. Belum lagi adanya kecenderungan ABRI pada waktu itu secara transparan menunjukkan pemihakannya pada salah satu partai politik. Disadari atau tidak, semuanya ini telah menjadi bom waktu bagi TNI itu sendiri seiring dengan bergulirnya reformasi.

Mencermati hal-hal tersebut di atas, munculnya berbagai tuntutan terhadap keberadaan komando kewilayahan (baca: koter) tersebut dapat dipahami sebagai salah satu aspirasi yang berkembang menuju Indonesia Baru yang demokratis. Namun, harus disadari bahwa kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan oleh TNI khususnya komando teritorial pada masa yang lalu bukan berarti harus disikapi secara ekstrim dengan membubarkan institusinya tanpa pernah mau memikirkan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Akan tetapi harus diupayakan untuk memahami serta bagaimana menempatkan dan memberdayakan institusi tersebut secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, maka dirasakan perlu untuk melakukan penelitian mengenai komando kewilayahan TNI AD yang diformat dalam judul *"Efektivitas Komando Kewilayahan TNI AD Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Wilayah"*.

### **Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian

ini adalah bagaimana persepsi masyarakat mengenai komando kewilayahan TNI AD, bagaimana aktualisasi tugas komando kewilayahan TNI AD (baca: Kodim 0705/Magelang) serta bagaimana efektivitasnya dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah.

## Landasan Teori

### Efektivitas

Dalam memahami makna efektivitas, pada dasarnya terkandung pengertian yang berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1989) dikatakan bahwa efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Hal yang sama juga terdapat dalam Ensiklopedi Indonesia (1980) di mana dikatakan bahwa efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuannya. Sementara itu, Peter F. Drucker dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia (1989) mendefinisikan efektif sebagai "menjalankan pekerjaan yang benar" (*to do the right things*). Selanjutnya, Soekanto (1983) menekankan bahwa efektivitas secara etimologi berasal dari kata "*effectiveness*" yang berarti taraf sampai yaitu sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa efektivitas merujuk pada sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Sejalan dengan hal ini, Georgepolous (1969) mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan suatu sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuannya tanpa pemborosan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya. Dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa efektivitas organisasi merupakan tingkat sejauh mana suatu organisasi mampu melakukan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi agar supaya tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan semaksimal mungkin segala alat, sarana dan sumber daya yang tersedia.

Pendekatan tujuan adalah merupakan salah satu pendekatan tertua dan sudah dikenal secara umum dalam mengevaluasi efektivitas organisasi. Seperti dikemukakan oleh Gibson dkk (1996) bahwa organisasi maupun kelompok dan individu itu harus dievaluasi dari segi pencapaian tujuan telah diterima secara umum maupun secara luas. Pendekatan tujuan menunjukkan bahwa organisasi itu dibentuk dengan tujuan tertentu, bekerja secara rasional dan berusaha mencapai tujuan tertentu.

Pendekatan tujuan dalam efektivitas organisasi secara eksplisit mengakui bahwa organisasi yang berbeda mengejar tujuan yang berbeda pula. Diakui pula bahwa sebagian besar organisasi tidak dapat memaksimalkan tujuan tertentu sekalipun mereka menghendaknya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa hambatan dan keterbatasan dalam mencapai tujuan tersebut. Optimalisasi tujuan harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada. Jadi, pada dasarnya konsep efektivitas dinilai dari tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan pada optimalisasi tujuan organisasi (Steers, 1985).

### Ketahanan Wilayah

Ketahanan wilayah adalah merupakan sub sistem dari ketahanan nasional. Artinya, ketahanan wilayah adalah bagian integral dan tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu sendiri akan menjadi kebutuhan setiap bangsa. Kebutuhan akan hal ini menjadi sangat penting mengingat setiap bangsa di dunia ini pasti mempunyai tujuan nasional yang ingin dicapai. Suatu bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasionalnya tidak terlepas dari pengaruh keadaan lingkungannya, baik lingkungan luar maupun lingkungan dalam. Sebagai akibat kenyataan ini, maka dalam usaha untuk mencapai cita-cita nasional, suatu negara tidak terlepas dari proses persentuhan dengan ATHG. Dalam rangka menghadapi ATHG tersebut terdapat berbagai perwujudan ketahanan yang dianut oleh negara-negara di atas bumi ini. Bagi bangsa Indonesia, perwujudan ketahanan yang dimaksud dikenal dengan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional (Suryosumarto, 2001). Senada dengan ini, Sunardi (1999) mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.

Pada intinya ketahanan nasional merujuk pada konsep kemampuan bangsa untuk menghadapi situasi krisis, baik berupa kegoncangan dalam negeri maupun serangan oleh pihak lain dari luar, digambarkan sebagai sesuatu yang tidak hanya didapatkan dari kekuatan militer tetapi juga dari kekuatan-kekuatan non militer.

Hakikat ketahanan nasional terletak pada kemampuan serta ketangguhan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensi dirinya menuju masa depan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Proses untuk mewujudkan kondisi tersebut memerlukan konsepsi yang dinamakan ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional pada hakikatnya adalah konsepsi pengaturan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan dalam kehidupan nasional. Ini berarti bahwa dalam kehidupan nasional secara keseluruhan dan pada tiap-tiap aspek kehidupan nasional, baik pada prosesnya maupun pada outputnya selalu terpadu komponen keamanan dan komponen kesejahteraan yang seimbang dan serasi.

Ketahanan nasional harus terus dibina dan ditingkatkan agar dapat mengeliminasi adanya tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya pembinaan ketahanan nasional diawali dari wilayah administratif terkecil yang telah berhadapan dengan aspek-aspek kehidupan yang kompleks yakni pada tingkat daerah atau kabupaten. Ketahanan nasional yang merupakan suatu kondisi dinamik akan merupakan suatu kekuatan nyata dan efektif jika dibina secara bertahap melalui adanya ketahanan daerah, dimana ketahanan daerah dibina melalui ketahanan lingkungan/desa, selanjutnya ketahanan lingkungan/desa dibina melalui ketahanan keluarga/rumah tangga, dan pada akhirnya ketahanan keluarga akan bertumpu pada kekuatan-kekuatan unsumnya yaitu manusia yang harus memiliki ketahanan pribadi.

Menurut Edi Sudradjat dalam Amal dan Armawi (1996), dikemukakan bahwa ketahanan nasional yang pada kenyataan aktualnya adalah hasil sinergi dari ketahanan daerah atau wilayah yang ada di seluruh Indonesia, yang berarti pula ia merupakan sinergi dari setiap ketahanan di dalam semua aspek kehidupan.

## CARA PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif. Pengambilan sampel didasarkan pada metode *purposive sampling* yaitu sampel bertujuan yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui reduksi data, panyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Persepsi Masyarakat Mengenai Keberadaan Komando Kewilayahan**

Komando Kewilayahan merupakan gelar kekuatan TNI Angkatan Darat yang terdiri dari Kodam, Korem, Kodim dan Koramil. Keberadaan institusi ini sempat menjadi kontroversi dan dipermasalahkan oleh sebagian kalangan khususnya pada awal bergulirnya reformasi. Hal ini mengemuka sebagai reaksi atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada era sebelumnya, sehingga muncul pendapat yang menghendaki agar komando kewilayahan dihapuskan atau dibubarkan saja. Kaitannya dengan hal tersebut, mayoritas responden (90%) menyatakan sikap tidak menyetujui dihapuskannya komando kewilayahan karena manfaatnya masih sangat dirasakan oleh masyarakat. Sikap mayoritas responden yang tidak menyetujui penghapusan komando kewilayahan ini diperkuat oleh beberapa pernyataan sebagai berikut :

Slamet Haryono, salah seorang staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemda Kabupaten Magelang berpendapat bahwa adanya tuntutan pembubaran Komando Kewilayahan beberapa waktu lalu itu hanyalah merupakan reaksi sesaat. Selengkapnya dikatakan bahwa :

"Saya rasa itu hanya sesaat. Reaksi yang serba sesaat karena kelihatannya kemarin mungkin dianggap karena mereka balas dendam saja. Dulu demikian superiornya ABRI, sangat dominannya ABRI dalam konstelasi politik kita sehingga mereka lalu menganggap sebaiknya ABRI kembali saja ke barak. Memang fungsi utamanya hankamrata, sehingga kalau ada pemikiran tentang pembubaran komando kewilayahan itu hanya sesaat, analisisnya belum secara menyeluruh karena situasi pada saat itu. Saya rasa ABRI sudah merespon dengan positif misalnya melalui reformasi internal. Keberadaan komando kewilayahan masih perlu, pendekatannya saja yang diubah dengan melibatkan seluruh unsur, misalnya tokoh-tokoh masyarakat" (wawancara, tanggal 05 Februari 2004).

Hal senada diungkapkan oleh Noor Cahyono, Kepala Desa Banyurojo Kecamatan Mertoyudan, bahwa eksistensi komando kewilayahan masih dibutuhkan untuk kondisi saat ini dengan alasan-



alasan untuk menyikapi gejolak-gejolak. Isu tuntutan pembubaran merupakan isu sesaat termasuk boleh dikatakan sebagai wacana untuk dilakukan sharing (wawancara, tanggal 05 Februari 2004). Sementara itu, K. H. Yusuf Chudlori, Ketua PKB Kabupaten Magelang dan juga seorang tokoh agama yang cukup berpengaruh, berpendapat bahwa :

"Secara tuntutan situasi era profesionalitas, seharusnya memang TNI konsentrasi pada bidang pertahanan, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat itu urusannya polisi. Tetapi mungkin memang dalam situasi transisi saat ini dari pemerintahan pro satatus quo ke pemerintahan yang baru, segala sesuatunya sulit diprediksikan. Bisa hari ini kelihatan aman, besok pagi bergejolak. Di situ saya melihat memang komando kewilayahan masih dibutuhkan, masih kita harapkan peran aktif dan langsung dari TNI dalam hal ini Kodim atau Koramil di desa-desa." (wawancara, tanggal 12 Februari 2004).

Selanjutnya, Supeno yang sehari-hari menjabat sebagai Ketua DPC Pepabri Kabupaten Magelang berpendapat bahwa komando kewilayahan harus tetap dipertahankan karena doktrin perang yang dianut bangsa Indonesia menghendaki adanya komando kewilayahan (wawancara, tanggal 12 Februari 2004).

Mencermati berbagai pendapat di atas, terlihat bahwa eksistensi komando kewilayahan masih tetap diperlukan meskipun harus diikuti oleh penyesuaian-penyesuaian seiring dengan adanya perubahan dan perkembangan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat Kabupaten Magelang terhadap keberadaan komando kewilayahan masih cukup tinggi. Tingginya dukungan masyarakat mengenai hal ini diakui pula oleh Kapten Inf. Purwadi yang sehari-hari menjabat sebagai Danramil 14/Dim 0705/Magelang, sebagaimana dinyatakan bahwa "masyarakat sangat mendukung keberadaan Koramil di wilayahnya, bahkan salah seorang tokoh masyarakat pernah menyampaikan bahwa kalau daerah ini (Muntilan) mau remuk, bubarkan saja Koramil. Di samping itu, partisipasi masyarakat di bidang pertahanan dan keamanan di wilayahnya cukup tinggi, di mana hampir setiap malam kantor Koramil penuh dengan masyarakat yang berkumpul di mana juga sering dihadiri oleh pemerintah setempat untuk membicarakan berbagai hal, khususnya yang menyangkut masalah keamanan bersama demi kemajuan di wilayahnya" (wawancara, tanggal 23 Maret 2004).

Berdasarkan hasil survey, juga ditemukan fakta bahwa seluruh responden sudah mengetahui adanya pemisahan antara TNI dan Polri yang telah membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas, di mana TNI melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan Polri di bidang

keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun demikian, rata-rata responden (80%) juga berpendapat bahwa TNI masih diperlukan untuk tetap membantu Polri dalam menangani masalah keamanan dan ketertiban masyarakat mengingat terbatasnya personil dan kemampuan aparat kepolisian. Selain itu memisahkan Polri dari TNI bukan berarti memisahkan keduanya sama sekali, dalam artian bahwa masih tetap diperlukan adanya koordinasi antara TNI dan Polri dalam pelaksanaan tugas.

Meskipun sudah mengetahui adanya pemisahan antara kedua institusi tersebut, namun rata-rata responden (73,33%) kurang memahami secara detail apa tugas dan fungsi komando kewilayahan, dalam hal ini Kodim khususnya yang berkaitan dengan bidang pertahanan. Mayoritas responden yang menyatakan tidak mengetahui secara detail tugas Kodim khususnya yang berkaitan dengan bidang pertahanan tersebut pada prinsipnya hanya mengetahui tugas Kodim sebagaimana apa yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membantu Polisi dalam bidang pengamanan, membantu korban bencana alam, dan kegiatan sosial lainnya. Bagi mereka, kehadiran aparat kewilayahan di suatu wilayah dipahami sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa aman, damai, tenteram, tertib dan teratur kepada masyarakat.

Mengenai peran Komando Kewilayahan di masa lalu, sebagian besar responden mengakui bahwa telah terjadi semacam "distorsi fungsional" yaitu melakukan sesuatu di luar dari tataran kewenangannya. Keterlibatan aparat kewilayahan dalam menangani berbagai persoalan yang sebenarnya merupakan wewenang instansi lain telah melahirkan interpretasi tentang kerancuan fungsi yang dilaksanakan oleh komando kewilayahan, terlebih di tingkat pelaksana seperti Koramil. Tidak dapat dipungkiri bahwa di masa yang lalu, Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai aparat kewilayahan yang ditempatkan di setiap desa/kelurahan memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi partisipasi politik warga masyarakat di desa yang menjadi binaannya, misalnya pada saat pemilihan kepala desa, peran aparat kewilayahan sangat menentukan dalam memenangkan salah satu calon tertentu. Bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan di masa lalu tersebut mulai ditata seiring dengan kesadaran TNI untuk mereformasi diri melalui reformasi internalnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa TNI secara sungguh-sungguh melakukan penataan-penataan untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruannya selama ini. Adanya keseriusan TNI dalam melakukan penataan-penataan tersebut telah ditanggapi positif oleh responden, di mana sejumlah 70% responden merasa yakin dengan kesungguhan TNI untuk meninggalkan peran yang selama ini dianggap menyimpang dari

fungsi dan kewenangannya serta lebih menempatkan diri dalam fungsi pertahanan. Sementara itu, 23,33% responden yang menyatakan ketidakyakinannya dikarenakan mereka lebih condong melihat pengalaman masa lalu bahwa keterlibatan TNI pada hampir semua lini kehidupan sudah terlanjur mengakar sehingga sulit untuk mengubahnya secara drastis.

Mengenai masalah pembenahan kultur aparat kewilayahan, hampir setiap responden berpersepsi bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan. Sikap merasa diri sebagai warga kelas satu, sikap merasa superior di antara yang lainnya, maupun sikap arogansi yang sering ditunjukkan selama ini sudah jarang ditemukan di lapangan, meskipun secara kasuistik masih sering ditemui adanya oknum-oknum yang melakukan tindakan di luar dari ketentuan yang sebenarnya.

Berdasarkan pemahaman pada uraian di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan komando kewilayahan TNI AD dalam hal ini Kodim 0705/Magelang beserta jajarannya ditanggapi cukup positif, di mana keberadaannya cukup membantu dalam mewujudkan kondisi aman dan rasa aman bagi masyarakat.

### **Aktualisasi Tugas Kodim 0705/Magelang**

#### **Tugas pertahanan**

Kodim 0705/Magelang sebagai salah satu satuan kewilayahan TNI AD bertanggung jawab terhadap masalah pertahanan di wilayah Magelang. Tugas pertahanan ini erat kaitannya dengan penyiapan wilayah berperang.

Implementasi tugas yang dilaksanakan oleh Kodim 0705/Magelang untuk mendukung tugas pertahanan dalam rangka mempersiapkan wilayah berperang, dapat divisualisasikan sebagai berikut :

#### **a. Mempersiapkan daerah pangkal perlawanan**

Kodim 0705/Magelang sebagai wilayah sub-sub kompartemen strategis mempunyai kewenangan untuk menentukan daerah pangkal perlawanan dalam rangka pertahanan aspek darat di wilayahnya. Kodim 0705/Magelang dalam menentukan lokasi yang cocok untuk dijadikan daerah pangkal perlawanan, tidak ditentukan begitu saja tetapi terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data yang nantinya digunakan untuk menentukan klasifikasi wilayah. Secara teknis militer, suatu wilayah yang dipilih sebagai daerah pangkal perlawanan harus memenuhi kriteria 5 aspek medan yakni: 1) daerah yang dipilih memiliki karakteristik sebagai medan kritis, yaitu suatu medan yang apabila dikuasai dapat menguntungkan pihak yang

menguasainya dan merugikan pihak lawan atau musuh; 2) daerah tersebut memiliki lindung tembak dan lindung tinjau, artinya daerah yang terlindung dari tembakan dan peninjauan musuh; 3) memiliki lapangan tembak dan lapangan tinjau; 4) memiliki rintangan sebagai penghambat gerakan bagi musuh yang akan menyerang; dan 5) mempunyai jalan pendekat untuk memudahkan pasokan logistik dan sebagai jalur pelolosan apabila kekuatan musuh lebih kuat. Bagi Kodim 0705/Magelang, daerah yang dapat dijadikan sebagai daerah pangkal perlawanan telah disiapkan.

b. Membentuk kekuatan perlawanan rakyat

Dalam melaksanakan tugas ini, Kodim 0705/Magelang sifatnya membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Dalam pelaksanaannya Kodim berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai perlunya pembentukan kekuatan perlawanan rakyat. Bentuk koordinasi yang dilakukan mulai dari persiapan personil calon Wanra, pelatihan, serta pembinaannya secara berlanjut. Seluruh anggaran yang diperlukan selama dalam tahap persiapan sampai dengan pelatihan selesai ditanggung oleh pemerintah daerah.

c. Mempersiapkan logistik wilayah

Untuk menentukan lokasi-lokasi yang dapat dijadikan sebagai pusat logistik, Kodim 0705/Magelang terlebih dahulu melakukan pendataan mengenai lokasi yang dinilai memiliki potensi logistik yang cukup guna kesiapan perang dalam waktu lama. Data mengenai daerah-daerah tersebut kemudian dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu daerah sebagai pusat logistik wilayah. Desain logistik wilayah dari Kodim 0705/Magelang kemudian dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat.

### Civic mission

Tugas ini menyangkut bantuan yang diberikan oleh TNI terhadap masalah-masalah kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam atau pertolongan kepada korban bencana alam, penyaluran sembako kepada warga yang membutuhkan, dan berbagai misi kemanusiaan lainnya.

Dalam aplikasinya di lapangan, Kodim selalu mengambil bagian untuk berpartisipasi aktif dalam misi kemanusiaan baik diminta ataupun tidak. Kaitannya dengan hal ini, seperti yang dituturkan oleh Kapten Inf. Purwadi, seorang aparat kewilayahan yang menjabat sebagai Danramil, bahwa pada saat terjadi bencana seperti tanah longsor dan sebagainya (baik berdasarkan informasi dari masyarakat ataupun diketahui secara langsung oleh aparat), secara otomatis aparat Kodim

dengan cepat langsung mengambil tindakan dengan mendatangi lokasi pada kesempatan pertama untuk memberikan pertolongan kepada warga yang terkena bencana (wawancara, tanggal 23 Maret 2004). Hal ini menunjukkan bahwa Kodim beserta jajaran yang ada di bawahnya merasa memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan misi kemanusiaan ini.

Sebagai gambaran konkrit dalam satu tahun terakhir ini, Kodim 0705/Magelang telah melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan *civic mission*, antara lain adalah membantu masyarakat yang terkena bencana alam angin ribut di Desa Tamanagung pada bulan Januari 2003, membantu masyarakat yang terkena bencana alam tanah longsor di Dusun Krajan II, Desa Kalirejo yang terjadi pada bulan Pebruari 2003 serta di Dusun Kejiwan, Desa Krasak pada bulan Maret 2003. Di samping itu, pada bulan Juni 2003 secara serentak melalui 21 Koramil yang ada di wilayah Kabupaten Magelang, Kodim melaksanakan penyaluran sembako kepada warga yang membutuhkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran aparat Kodim 0705/Magelang dalam misi seperti ini dirasakan sangat membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami oleh masyarakat.

#### Tugas bantuan kepada Polri

Pada masa lalu, TNI dapat secara langsung menangani permasalahan kamtibmas yang menjadi domain Polri, namun saat ini hal itu tidak dapat dilakukan lagi sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan TNI dan Polri yang sebelumnya berada dalam satu wadah yaitu ABRI.

Bantuan perkuatan unsur Kodim 0705/Magelang kepada Polres Magelang diberikan atas permintaan untuk menambah kekuatan aparat kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi serta memulihkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selama ini bantuan yang diberikan oleh Kodim 0705/Magelang berupa bantuan pengamanan terhadap berbagai kegiatan, antara lain pengamanan wilayah khususnya terhadap obyek vital yang dilakukan setiap hari melalui patroli oleh piket garnizun, bantuan pengamanan pada saat pemberangkatan maupun kedatangan jamaah haji Kabupaten Magelang pada setiap tahunnya, bantuan pengamanan pada acara perayaan hari-hari besar keagamaan seperti perayaan Waisak di Candi Mendut dan Borubudur, bantuan pengamanan VVIP/VIP yang dilakukan terhadap pejabat penting negara dan tamu asing negara yang berkunjung ke Magelang, serta bantuan lain yang disesuaikan dengan koordinasi antara aparat kewilayahan dengan aparat kepolisian.

### Tugas Bantuan Kepada Pemerintah Daerah

Pada masa damai kemampuan TNI dapat dimanfaatkan untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan yang diberikan TNI kepada pemerintah daerah ini diwujudkan dalam bentuk Bhakti TNI. Bhakti TNI adalah merupakan metode pembinaan teritorial yang menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menunjang, mendinamisasi atau lebih meningkatkan pembangunan masyarakat yang terkait dengan ketahanan.

Bhakti TNI dilaksanakan dengan cara:

- a. Karya bhakti, yang dilaksanakan oleh satuan atau perorangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kodim 0705/Magelang secara aktif dan rutin tiap bulan untuk menjawab kebutuhan masyarakat setempat atau membantu mengatasi kesulitan rakyat di wilayahnya. Sebagai gambaran konkrit, berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kegiatan Karya Bhakti Kodim 0705/Magelang Tahun 2003

Waktu	Lokasi	Kegiatan
1	2	3
6 - 1 - 03	Desa Ketundan	Pemasangan pipa sahur air minum Pembuatan MCK
14 s/d 24-1-03	Desa Tamanagung	Pembersihan TMP II Cawang
20 - 2 - 03	Kel. Jurangombo	Pemerataan badan jalan
17 s/d 29-3-03	Kel. Sumberrejo	Pembersihan jalan
5 - 4 - 03	Jalan A. Yani	Rehabilitasi rumah yang terkena bencana
21 - 4 - 03	Desa Kalirejo	Pembuatan MCK
13 s/d 15-5-03	Desa Kajoran	Pelebaran jalan
2 s/d 6-6-03	Desa Kalegen	Pelebaran jalan
4 - 6 - 03	Desa Salaman	Pembersihan selokan
21 - 7 - 03	Desa Senden	Pemerataan jalan lokasi TMMD
8 - 8 - 03	Desa Kalegen	Pemasangan krmk Musholah
26 s/d 27-9-03	Kel. Rejowinangun	Pembersihan TMP
4 s/d 5-12-03	TMP Giri Dharmoloyo	

Sumber : Staf Operasi Kodim 0705/Magelang

- b. Operasi bhakti sebagai tugas yang dilaksanakan atas perintah dengan dibatasi ruang dan waktu. Biasanya wujud dari kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk TMMD (Tentara Manunggal Membangun Desa). TMMD Sengkuyung adalah program operasi bhakti dari komando atas yang dilaksanakan oleh Kodim 0705/

Magelang secara rutin 2 X dalam setahun. Untuk tahun 2003 ini TMMD Sengkuyung dilaksanakan di dua lokasi dalam wilayah Kabupaten Magelang, yaitu:

- 1) TMMD Sengkuyung I yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 28 April 2003 di wilayah Desa Sumberrejo Kec. Mertoyudan, dengan sasaran fisik berupa pengaspalan jalan, pembuatan gorong-gorong plat beton, dan pembuatan talud, serta sasaran non fisik berupa penyuluhan PPBN, penyuluhan kamtibmas/narkoba dan pembuatan akte kelahiran secara massal terhadap 35 orang yang belum memiliki akte kelahiran.
- 2) TMMD Sengkuyung II dilaksanakan pada tanggal 9 s/d 29 September 2003 di wilayah Desa Kalegen Kec. Bandongan, dengan sasaran fisik berupa pengerasan jalan sepanjang, pembuatan plat beton, pembuatan gorong-gorong dan pembuatan senderan, serta sasaran non fisik berupa penyuluhan PPBN, penyuluhan kamtibmas/narkoba, penyuluhan kesehatan dan pembinaan rohani.

Pembangunan sektor fisik seperti perbaikan jalan, pembuatan talud atau perbaikan tempat-tempat ibadah sebenarnya hanyalah merupakan suatu rangkaian dari program pembangunan mental dan karakter bangsa. Sasaran utamanya adalah untuk membangkitkan dan memotivasi serta menumbuhkan keterlibatan dan kesadaran rakyat dalam menolong diri mereka sendiri, maupun dalam proses pembangunan di daerah. Dengan demikian, pesan yang disampaikan lewat TMMD mempunyai jangkauan yang jauh lebih luas dan lebih mendasar, yakni membawa pesan untuk menyentuh serta menggugah kesadaran rakyat agar semakin memahami hak dan kewajibannya dalam berperan aktif untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Wujud konkrit dari tugas bantuan yang diberikan oleh Kodim 0705/ Magelang kepada pemerintah daerah Kabupaten Magelang terbukti dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketahanan wilayah.

**Efektivitas Kodim 0705 dalam Mewujudkan Katahanan Wilayah di Magelang**

Kabupaten Magelang sebagai salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Tengah, dikenal sebagai daerah yang realitas kehidupan masyarakatnya cukup kondusif. Kondusifnya Kabupaten Magelang ini dapat terlihat dari rendahnya intensitas gejala yang timbul di wilayah

ini bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Jawa Tengah, bahkan pada lingkup nasional. Terwujudnya kondisi daerah yang relatif stabil, aman dan kondusif ini tentunya tidak terjadi begitu saja dan bukan merupakan hasil kerja dari salah satu atau berbagai kalangan tertentu saja, akan tetapi semuanya ini tidak terlepas dari adanya kesadaran dan hasil kerja sama seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Magelang, termasuk didalamnya Kodim 0705/Magelang.

Sekecil apapun perannya, Kodim 0705/Magelang dapat dikatakan mempunyai andil yang tidak sedikit dalam rangka penciptaan kondisi ketahanan wilayah di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil survey, diketahui sejumlah 63,33% responden meyakini keberadaan Kodim 0705/Magelang dapat membantu menciptakan terwujudnya ketahanan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kodim 0705/Magelang dalam mewujudkan ketahanan wilayah di daerah Magelang cukup membantu.

Kontribusi nyata Kodim 0705/Magelang dalam hal ini dapat terlihat dari realitas tugasnya sehari-hari, diantaranya kegiatan *civic mission*, tugas bantuan kepada Polri maupun tugas bantuan kepada pemerintah daerah serta tugas sebagai penyanggah awal setiap ancaman di wilayah daratan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan *civic mission* dan tugas bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan, sementara tugas bantuan yang diberikan kepada Polri dan tugas sebagai penyanggah awal terhadap setiap ancaman di wilayah daratan adalah merupakan tugas-tugas yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pertahanan keamanan.

Kegiatan *civic mission* yang dilakukan oleh Kodim 0705/Magelang merupakan bentuk kepedulian aparat kewilayahan terhadap masalah-masalah kemanusiaan. Permasalahan kemanusiaan yang sering dihadapi di wilayah Kodim 0705/Magelang antara lain penanggulangan bencana alam, penyaluran sembako kepada warga yang membutuhkan, dan berbagai misi kemanusiaan lainnya. Dalam aplikasinya di lapangan, Kodim selalu mengambil bagian untuk berpartisipasi aktif baik diminta ataupun tidak. Sementara itu, bantuan kepada pemerintah daerah pada dasarnya diberikan untuk membantu pelaksanaan program-program pembangunan seperti pembangunan fasilitas umum dan prasarana wilayah lainnya yang aplikasinya diwujudkan dalam bentuk Bhakti TNI. Kesemuanya ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain sasaran yang bersifat fisik, sasaran non fisik juga menjadi tujuan daripada program bhakti TNI, misalnya memantapkan kesediaan bela negara, menumbuhkan kesadaran dan



mendorong peran serta masyarakat dalam mensukseskan pembangunan khususnya yang terkait dengan pertahanan negara aspek darat.

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan keamanan, adanya pemisahan antara TNI dan Polri tentu membawa konsekuensi terhadap bidang tugas masing-masing. Kaitannya dengan hal ini, meskipun tanggung jawab keamanan di Kabupaten Magelang secara institusi berada di tangan Kepolisian Resort Magelang, namun keberadaan Kodim 0705/Magelang masih diharapkan untuk membantu Polri dalam memberikan rasa aman bagi masyarakat. Hasil survey menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan setuju jika Kodim masih diperlukan untuk membantu Polri. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih memiliki kepercayaan yang cukup tinggi terhadap Kodim sebagai suatu institusi yang dapat memberikan rasa aman disamping Polri.

Sementara itu, sebagai gelar TNI AD yang berada di lingkup kewilayahan, Kodim 0705/Magelang berfungsi sebagai penyanggah awal terhadap segala ancaman di wilayahnya, artinya keberadaan Kodim beserta jajaran dibawahnya yaitu Koramil serta penempatan Babinsa di wilayah akan menutup kemungkinan celah-celah wilayah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan kondisi wilayah Magelang, di mana hal ini akan berpengaruh secara signifikan terhadap terwujudnya ketahanan wilayah.

Beberapa hal seperti yang dikemukakan dalam uraian di atas adalah merupakan wujud nyata dari masih tingginya tingkat partisipasi Kodim 0705/Magelang dalam rangka penciptaan kondisi aman dan rasa aman masyarakat yang merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan wilayah.

Dengan demikian, mengalir dari pemahaman di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan Kodim 0705/Magelang cukup efektif dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional di wilayah Kabupaten Magelang, di mana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, persepsi masyarakat di Kabupaten Magelang terhadap keberadaan Kodim 0705/Magelang cukup positif, dalam artian bahwa keberadaannya cukup membantu dalam memberikan rasa aman dan kondisi aman bagi masyarakat. *Kedua*, aktualisasi tugas yang dilaksanakan oleh Kodim 0705/Magelang sebagai wujud dari gelar kekuatan TNI AD dalam bentuk Bala Pertahanan Wilayah meliputi tugas pertahanan, *civic mission*, dan tugas bantuan.

*Ketiga*, sekecil apapun perannya keberadaan Kodim 0705/Magelang masih cukup efektif dalam rangka penciptaan kondisi ketahanan nasional di wilayah Kabupaten Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bagyo, Hary. 1996. *Perang Abad-21 dan Sishankamrata*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Basrie, Chaidir. 2002. *Pemantapan Wawasan Nusantara Menuju Ketahanan Nasional*. Program Studi Ketahanan Nasional, PPS UGM, Yogyakarta.
- Besar, Abdulkadir. 2002. *Redefinisi Pengertian Ketahanan Nasional: Suatu Usulan Konstruktif*. Pusat Studi Pancasila, Universitas Pancasila, Jakarta.
- Bhakti, dkk. 1999. *Tentara Mendamba Mitra*. Penerbit Mizan, Bandung.
- Dinas Sejarah TNI AD. 1982. *Sejarah TNI AD 1945-1973*. Disjarah TNI AD, Jakarta.
- Dispenad. 1986. *Reorganisasi TNI AD 1984*. Dispenad, Jakarta.
- Ensiklopedi Indonesia. 1980. *Ichtiar Baru-Van Hoeve*, Jakarta.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1989. Jilid 5. P. T. Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Fay, Brian. 1975. *Social Theory and Political Practice*. Geoge Allen and Unwin Ltd., London.
- Georgepolous, dkk. 1969. "A Study of Organizational Effectiveness", dalam Amitai Etzioni (ed). *Reading on Capability for Development* UN, New York.
- Gibson, James L., dkk. 1996. *Organisasi: Prilaku, Struktur dan Proses*. Edisi Kedelapan, Jilid I. Alih Bahasa: N. Indriani. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Mabesad. 2000. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembinaan Teritorial Kedepan*. Mabesad, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Penjelasan Kasad Tentang Visi, Misi dan Pembinaan Teritorial TNI AD*. Mabesad, Jakarta.
- Mabes TNI. 1999. *TNI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI Dalam Kehidupan Bangsa*. Mabes TNI, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Posdakarya, Bandung.
- Nasution, A. H. 1980. *Pokok-Pokok Gerilya*. Angkasa, Bandung.
- Prayudi. 2001. "Tuntutan Politik Kebangsaan Sebagai Landasan Profesionalisme TNI". *Kajian*, Vol. 6, No. 1, 23-51.
- Pusdikter. 2003. *Naskah Departemen Tentang Binter Dalam Paradigma Baru TNI*. Pusdikter, Bandung.
- Puster AD. 2002. *Mengapa Komando Kewilayahan Harus Ada*. Pusat Teritorial AD, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Implementasi Binter TNI AD Pada Era Reformasi*. Pusat Teritorial AD, Bandung.
- Said, Budiman Djoko. 2001. "Masa Transisi Mewujudkan Integrasi Bangsa Dalam Perspektif Sejarah". *KVJ*, 101, 69-83.

- Said, Salim. 2001. *Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini dan Kelak*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Samego, Indria. 2000. *TNI Di Era Perubahan*. Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (Ed.) 2001. *Sistem Pertahanan Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. The Habibie Center, Jakarta.
- Singarimbun, M. dan Sofian Efendi (Eds.) 1991. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Soewarso. 1982. *Wawasan Nusantara-Ketahanan Nasional-Keamanan Nasional*. Alumni STTAL, Jakarta.
- Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.
- Sudradjat, Edi. 1996. *Ketahanan Nasional Sebagai Kekuatan Penangkalan: Satu Tinjauan Dari Sudut Kepentingan Hankam*. Dalam Ichlasul Amal dan Armaidly Armawi (Peny.) *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta, Bandung.
- Sujono, Djoko. 2001. "Kontribusi Seskoad Memantapkan Integritas Bangsa". *KVJ*, 101, 1-7.
- Sukanto, Soerjono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Rajawali, Jakarta.
- Sumarna, Enna dan H. Hanafie. 2001. "Peran Koter dalam Mewujudkan Integrasi Bangsa". *KVJ*, 101, 26-32.
- Sunardi, R. M. 1999. *Teori Ketahanan Nasional*. Program Studi Ketahanan Nasional, PPS UGM, Yogyakarta.
- Sundhaussen, Ulf. 1988. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. LP3ES, Jakarta.
- Suradinata, Ermaya dan Alex Dinuth. 2001. *Geopolitik dan Konsepsi Ketahanan Nasional*. P. T. Paradigma Cipta Yatsigama, Jakarta.
- Suryohadiprodjo, Sayidiman. 1997. "Ketahanan Nasional Indonesia". *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. II (1), 1997.
- Suryosumarto, Budisantoso H. 2001. *Ketahanan Nasional Indonesia Penangkal Disintegrasi Bangsa dan Negara*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1998. "Reformasi dan Ketahanan Nasional". *Maj. Ketahanan Nasional*, 69, 61-80.
- Widjojo. Agus. 2001. *Peran Militer Dalam Proses Demokratisasi Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Yayasan Alumni Undip, Semarang.

#### Surat Kabar :

*Jawa Pos*, 24 Mei 1999.

*Kompas*, 5 Mei 1999.

\_\_\_\_\_, 13 Juli 2002.

*Palagan*, No. 15 Tahun II, Desember 2002.